

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 menjadi perhatian masyarakat internasional karena terjadi di tengah transisi demokrasi dan pandemi yang diikuti banyak pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi bukan hanya pelanggaran hak sipil dan politik, tetapi juga pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN memiliki kepentingan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam ASEAN Charter menyatakan bahwa organisasi ini memiliki prinsip dan tujuan untuk memajukan dan melindungi HAM di Asia Tenggara. ASEAN juga memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak di luar ASEAN. Namun perlu diingat juga bahwa dalam ASEAN Charter terdapat prinsip non-intervensi yang berarti bahwa setiap negara anggota tidak dapat melakukan tindakan intervensi terhadap negara lain yang sedang mengalami konflik.

Upaya pertama yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Myanmar adalah menyatukan pandangan negara-negara anggota melalui IAMB. Setelah memiliki pandangan yang sama, ASEAN mengadakan dialog konstruktif untuk mencari solusi damai melalui *ASEAN Leaders Meeting*. Pertemuan tersebut menghasilkan Lima Poin Konsensus sebagai acuan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Dalam upaya merealisasikan Lima Poin Konsensus, ASEAN telah memberikan bantuan kemanusiaan, menunjuk Utusan Khusus dan mengunjungi Myanmar, serta melakukan dialog konsultatif.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ASEAN ini bertujuan untuk mempertahankan norma regional *ASEAN Way*. Hal tersebut terlihat dari upaya ASEAN melindungi HAM di Myanmar tanpa melakukan intervensi langsung terhadap politik dalam negerinya. ASEAN lebih berfokus pada dialog, mediasi, dan

diplomasi untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan.

Meskipun demikian, realisasi Lima Poin Konsensus belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya perbedaan persepsi HAM antara ASEAN dan Myanmar. Lima Poin Konsensus juga dinilai gagal mengatasi permasalahan di Myanmar karena tidak dilaksanakan dengan tegas. ASEAN didorong untuk merekonstruksi solusi damai yang mereka buat agar memiliki dampak yang lebih kuat dalam mengatasi permasalahan HAM di Myanmar.

